

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

DISINTEGRASI TIMOR TIMUR 1999

OLEH: RAPINUS RAIS

NIM: 971314007

NIM: 970051120604120042

Skripsi ini bertujuan untuk membahas empat permasalahan. Pertama, latar belakang integrasi Timor Timur tahun 1976. Kedua, tentang keadaan politik, sosial, pendidikan dan agama di Timor Timur antara tahun 1976-1999. Ketiga, tentang proses disintegrasi Timor Timur 1999. Dan keempat, tentang dampak disintegrasi tahun 1999 bagi Indonesia dan bagi Timor Lorosae.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yaitu: pertama, pengumpulan sumber (heuristik) diperoleh dari sumber kepustakaan dan kliping koran, kedua, kritik sumber (verivikasi) dengan melakukan perbandingan antara sumber-sumber yang ada. Jika data telah menunjukkan kesesuaian maka dipilih sebagai sumber, ketiga, interpretasi (penafsiran sumber) merupakan analisa data hasil verivikasi dan, keempat, historiografi (penulisan sejarah) untuk menyajikan hasil penelitian menjadi satu tulisan sejarah sehingga dapat mempermudah penyampaian peristiwa kepada pembaca. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu sosial seperti politik, sosiologi dan sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, integrasi Timor Timur 1976 terjadi karena adanya keinginan dari empat partai politik yang dituangkan dalam Deklarasi Balibo. Kedua, keadaan Timor Timur selama bernaung dengan NKRI secara politik, masalah Timor Timur mengganjal di forum PBB dan rakyat Timor Timur hidup dalam situasi kadang-kadang tenang kadang-kadang perang, penuh teror, dan intimidasi. Secara sosial telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Timor Timur. Secara pendidikan, antara lulusan pendidikan dengan lapangan pekerjaan tidak seimbang. Dan keadaan agama, telah terjadi pelecehan terhadap agama tertentu di Timor Timur. Ketiga, terjadinya disintegrasi 1999 sebabnya adalah adanya opsi yang dikeluarkan oleh presiden B.J Habibie. Dan keempat, disintegrasi Timor Timur 1999 masih menyisakan masalah yang pelik antara kedua negara baik masalah politik, ekonomi maupun sosial.

**ABSTRACT**

**THE DISINTEGRATION OF EAST TIMOR 1999**

By Rapius Rais

Student Number 971314007

Student Registered Number 970051120604120042

This research is carried out to expose four problems in relationship with the disintegration of East Timor in 1999. They are, first, the background of East Timor integration into Indonesia in 1976; second, the condition of social, political, education and religious life during the time of integration 1976-1999; third, the how and why the disintegration process of East Timor in 1999, and fourth, the impact of the disintegration.

This research is library research. Political, social and historical approaches are used in order to give clear and comprehensive explanation about the disintegration case. After collecting the data, the researcher then does data verification by making comparison towards the available data. The next step is the process of interpretation towards the data. The final is the presentation of the study in the model of historical writing.

In summary, there are some points of this research. Balibo declaration in 1976 where four parties on behalf of East Timor people declared their wish to integrate into Indonesia is considered as the base for integration. Part of Indonesian territory during 1976-1999, the area remained unstable politically as Indonesia failed to get international acknowledgement and support for final status of the integration. Human right violations in the province have drawn international protest and weakened Indonesian position in international forum.

In education sector, central government provided and improved education facilities but failed to give opportunities for employment. While, in religious aspect, the majority Catholic follower in the province felt threatened by another new growing religions in the area. The two factors have grown social problems for the people of East Timor.

The disintegration of East Timor in 1999 happened as Indonesian government failed to get final status of the integration at international level. It was also the fruit of policy of president B.J. Habibie then who offered option of freedom, ignoring the implementation of autonomy status first. The disintegration leaves problems of social, politics and economic for the two countries, Indonesia as well as the new country Timor Lorosae.